



PISAgro



THE FARM

Featured Agriculture Reportings Magazine

EDISI BULAN JULI
JULY EDITION



PESAN DARI DIREKTUR KAMI

Rekan-rekan yang Terhormat,

Kita berjumpa kembali di The Farm edisi Juli 2022. Peremajaan menjadi elemen penting untuk menunjang proses transisi dari pandemi ke endemik, yang akan membuat ekonomi kita kembali perkasa seperti di masa pra-pandemi, bahkan lebih perkasa dari sebelumnya. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terus melakukan upaya terbaik untuk memastikan program peremajaan dapat mendukung ketahanan dan keberlanjutan yang lebih baik di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian.

Pada bulan ini, PISAgro mendapat kehormatan untuk menjadi *co-host* acara tingkat tinggi B20 yang membahas tentang rencana peremajaan tanaman menggunakan model *inclusive closed-loop* untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan juga petani kecil yang telah diikuti oleh ratusan partisipan dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat pemerintah, sektor swasta, wadah pemikir, asosiasi, dll.

Dalam buletin ini, kami akan membahas strategi dan tantangan Indonesia dalam upaya peremajaan tanaman di berbagai komoditas, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet. Pada edisi kali ini, kami juga berkesempatan berbincang dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, Ir. Ali Jamil, Ph.D, untuk mengenal lebih jauh lagi perihal upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kecil melalui skema pendanaan berkelanjutan dengan pendekatan ESG.

Akhir kata, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan yang telah diberikan kepada kami, sehingga Sekretariat PISAgro dapat terus menjalankan kegiatan kami. Selamat membaca The FARM edisi kali ini, dan semoga buletin ini dapat menjadi sumber inspirasi baru bagi Anda.

Insan Syafaat
Direktur Eksekutif PISAgro



OPENING REMARKS

Dear Readers,

We meet again in the July 2022 edition of The FARM. Rejuvenation becomes a critical element to supporting the shift from a pandemic to an endemic, which will make our economy robust again like in pre-pandemic period, even stronger than before. The government and other stakeholders continue to make best efforts to ensuring rejuvenation programmes can support better resilience and sustainability in various sectors, including the agricultural sector.

In this month, PISAgro was honoured to co-host the B20 high-level event that discussed about crop rejuvenation plans using the inclusive closed-loop model to improve the productivity of crops and also farmer smallholders which has been participated by hundreds of participants from multiple backgrounds, including government officials, private sectors, think-tanks, associations, etc.

In this bulletin, we will discuss Indonesia's strategies and challenges in crop rejuvenation efforts in various commodities, such as palm oil, coffee, cocoa, and rubber. In this edition, we also had the opportunity to talk with the General Director of the Agricultural Infrastructure and Facilities of the Ministry of Agriculture, Ir. Ali Jamil, Ph.D, to get to know more about the government efforts in improving smallholders' welfare through sustainable finance schemes with an ESG approach.

Finally, we would also like to thank all of you for the support that has been given to us, so that the PISAgro Secretariat can continue to carry out our activities. Happy reading this edition of The FARM, and we hope that this bulletin can be a source of new inspiration for you.

Insan Syafaat
Direktur Eksekutif PISAgro



THE FARM

CONTENTS

| | |
|----------------------------|----|
| ■ Pesan dari Direktur Kami | I |
| ■ <i>Opening Remarks</i> | II |
| ■ Sorotan | 3 |
| ■ <i>Highlights</i> | 6 |
| ■ Warta Agro | 9 |
| ■ <i>Agro News</i> | 13 |
| ■ Siaran Pers | 17 |
| ■ <i>Press Release</i> | 19 |
| ■ Profil | 21 |
| ■ <i>Profile</i> | 24 |



Pertemuan Project Steering Committee (PSC) The Economics of Ecosystem and Biodiversity for Agriculture and Food Initiative in Indonesia (TEEBAgriFood Indonesia)

Pada tanggal 12 Juli 2022, Direktur Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, mewakili Sekretariat PISAgro untuk menghadiri pertemuan Project Steering Committee (PSC) The Economics of Ecosystem and Biodiversity for Agriculture and Food Initiative in Indonesia (TEEBAgriFood Indonesia) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, bekerjasama dengan United Nations Environment Programme (UNEP) dan Bappenas, di DoubleTree Hotel, Menteng, Jakarta Pusat.

Pada kesempatan kali ini, dihasilkan keluaran berupa laporan hasil kegiatan dalam kerangka TEEBAgriFood Indonesia, serta simpulan dan rekomendasi atas hasil yang dicapai oleh tim peneliti (IPB University) dari komite dan para peserta sebagai tindak lanjut dari pertemuan PSC pertama.

Bimbingan Teknis dan Webinar “Ekonomi Hijau untuk Sistem Pangan Berkelanjutan” oleh Ditjen Tanaman Pangan Kementerian RI & PERHEPI

Pada tanggal 14 Juli 2022, Direktur Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, mewakili Sekretariat PISAgro untuk menjadi salah satu narasumber dalam webinar yang berjudul “Ekonomi Hijau untuk Sistem Pangan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).

Pada kesempatan kali ini, Direktur Eksekutif PISAgro beserta narasumber lainnya, yakni Prof. Dr. Yasini Deliana dari UNPAD & PERHEPI, Dr. Yudha H. Asnawi dari IPB & PERHEPI, serta Misbah Hasan dari FITRA, memberikan pandangannya mengenai kemitraan inklusif untuk menunjang pertanian berkelanjutan, beserta pengalaman PISAgro dalam usaha mendukung pertanian berkelanjutan di Indonesia.

Rapat Umum Anggota (RUA) Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)

Pada tanggal 19 Juli 2022, Sekretariat PISAgro menghadiri Rapat Umum Anggota (RUA) 2022 yang diselenggarakan oleh Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) secara hybrid di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

Pada kesempatan kali ini, Direktur Eksekutif PISAgro turut serta dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) bersama perwakilan LTKL dan jejaring mitra. Selain itu, acara ini juga menghasilkan keluaran berupa strategi-strategi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Diskusi Terfokus Penggalian Persepsi Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil tentang Beras Berkelanjutan dan Sustainable Rice Platform (SRP) Chapter Indonesia

Pada tanggal 19 Juli 2022, salah satu perwakilan kami, Hendri Surya W., mewakili Sekretariat PISAgro untuk menghadiri Diskusi Terfokus Penggalian Persepsi Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil tentang Beras Berkelanjutan dan SRP Chapter Indonesia yang diselenggarakan oleh Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) secara hibrida di Nampan Bistro, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pada kesempatan kali ini, Sekretariat PISAgro turut serta menyampaikan pendapatnya mengenai keberlanjutan dalam praktik pertanian beras di Indonesia. Dari kegiatan ini, dihasilkan keluaran berupa rencana tindak lanjut pascadiskusi berupa pembentukan *Sustainable Rice Platform* (SRP) Cabang Indonesia.

5. Forum Diskusi B20 “Mendorong Percepatan Program Peremajaan Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, dan Karet) untuk Petani Melalui Model Kemitraan yang Inklusif”

Pada tanggal 25 Juli 2022, Sekretariat B20 Indonesia bekerja sama dengan Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro) menggelar forum diskusi terkait peremajaan lahan perkebunan yang dimana diskusi ini memfasilitasi peran pemerintah, pelaku usaha dan akademisi untuk berbagi ide dan praktek terbaik terkait perkebunan yang inklusif.

Mengambil tema “Mendorong Percepatan Program Peremajaan Lahan Perkebunan untuk Petani Model Kemitraan Inklusif,” diskusi ini mengundang perwakilan pemerintah, pelaku usaha dan akademis bidang perkebunan yakni Musdhalifah Machmud, Deputi Koordinator Bidang Koordinasi Pangan & Pertanian, Kemenko Perekonomian; Arif P. Rachmat, Chair of B20 Trade and Investment Task Force; Ganesan Ampalavanar, President Director of Nestle Indonesia and Co-Chair of PISAgro.

Hadir juga Rainer Heufors, Executive Director of CIPS, and Host of T20 Food Security & Sustainable Agriculture Task Force; Josephus K.T., Komisaris Utama Mandiri Investasi; Widiantoko Sumarlin, Chief Sustainability Officer at PT Kirana Megatara dan Insan Syafaat, Direktur Eksekutif PISAgro.

Diskusi Terbatas dengan Pemda Kabupaten Fakfak Dalam Rangka Pendekatan Yurisdiksi

Pada tanggal 28 Juli 2022, Fathan Oktrisaf, mewakili Sekretariat PISAgro untuk menghadiri diskusi terbatas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang diselenggarakan oleh Yayasan INOBU di Hotel Pullman, Menteng, Jakarta Pusat.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Yayasan INOBU, Bupati Fakfak, Untung Tamsil, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Fakfak. Pada kesempatan kali ini, dihasilkan capaian berupa Kerjasama Berita Acara Pertemuan Multipihak sebagai bukti sinergitas untuk mendukung pertanian berkelanjutan di Kabupaten Fakfak.



Project Steering Committee (PSC) meeting of The Economics of Ecosystem and Biodiversity for Agriculture and Food Initiative in Indonesia (TEEBAgriFood Indonesia)

On the 12th of July 2022, the Executive Director of PISAgro, Insan Syafaat, represented the PISAgro Secretariat to attend the Project Steering Committee (PSC) meeting of The Economics of Ecosystem and Biodiversity for Agriculture and Food Initiative in Indonesia (TEEBAgriFood Indonesia) organized by the Faculty of Economics and Management of IPB, in collaboration with the United Nations Environment Program (UNEP) and Bappenas, at the DoubleTree Hotel, Menteng, Central Jakarta.

On this occasion, output was produced in the form of a report on the results of activities within the framework of TEEBAgriFood Indonesia, as well as conclusions and recommendations on the results achieved by the research team (IPB University) from the committee and the participants as a follow-up to the first PSC meeting.

Technical Guidance and Webinar “Green Economy for Sustainable Food Systems” by the Directorate General of Food Crops, Ministry of Agriculture & PERHEPI

On the 14th of July 2022, the Executive Director of PISAgro, Insan Syafaat, represented the PISAgro Secretariat to be one of the resource persons in the webinar entitled "Green Economy for a Sustainable Food System" organised by the Directorate General of Food Crops, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Indonesian Agricultural Economics Association (PERHEPI).

On this occasion, the Executive Director of PISAgro along with other resource persons, namely Prof. Dr. Yasini Deliana from UNPAD & PERHEPI, Dr. Yudha H. Asnawi from IPB & PERHEPI, and Misbah Hasan from FITRA, gave their views on inclusive partnerships to support sustainable agriculture, as well as PISAgro's experience in supporting sustainable agriculture in Indonesia.

General Meeting of Members of Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)

On the 19th of July 2022, the PISAgro Secretariat attended the 2022 General Meeting of Members (RUA) organized by Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) hybridly at JCC Senayan, Central Jakarta.

On this occasion, the Executive Director of PISAgro participated in the signing of a memorandum of understanding (MoU) with LTKL representatives and partner networks. In addition, this event also produces outputs in the form of strategies to support sustainable development by taking into account aspects of environmental sustainability and community welfare.

4. Focused Discussion Exploring the Perceptions of the Private Sector and Civil Society on Sustainable Rice and the Indonesian Chapter of Sustainable Rice Platform (SRP)

On the 19th of July 2022, one of our representatives, Hendri Surya W., representing the PISAgro Secretariat to attend a Focused Discussion on Exploring Perceptions of the Private Sector and Civil Society on Sustainable Rice and the Indonesian Chapter of SRP held by the People's Coalition for Food Sovereignty (KRKP) in hybrid Tray Bistro, Sunday Market, South Jakarta.

On this occasion, the PISAgro Secretariat participated in expressing its opinion on sustainability in rice farming practices in Indonesia. From this activity, the output in the form of a post-discussion follow-up plan was the establishment of the Indonesia Branch of the Sustainable Rice Platform (SRP).

B20 Discussion Forum “Encouraging the Acceleration of Plantation Crop Rejuvenation Programs (Oil Palm, Cocoa, Coffee, and Rubber) for Smallholders through Inclusive Partnership Models”

On July 25, 2022, the B20 Indonesia Secretariat in collaboration with the Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro) held a discussion forum related to plantation land rejuvenation where this discussion facilitated the role of the government, business actors and academics to share ideas and best practices related to inclusive plantations.

Taking the theme “Encouraging the Acceleration of Plantation Land Rejuvenation Programs for Inclusive Partnership Model Farmers,” this discussion invited representatives of the government, business players and academics in the plantation sector, namely Musdhalifah Machmud, Deputy Coordinator for Food & Agriculture Coordination, Coordinating Ministry for the Economy; Arif P. Rachmat, Chair of the B20 Trade and Investment Task Force; Ganesan Ampalavanar, President Director of Nestle Indonesia and Co-Chair of PISAgro.

Also attending were Rainer Heufors, Executive Director of CIPS, and Host of T20 Food Security & Sustainable Agriculture Task Force; Josephus K.T., President Commissioner of Mandiri Investasi; Widiantoko Sumarlin, Chief Sustainability Officer at PT Kirana Megatara and Insan Syafaat, Executive Director of PISAgro.

Limited Discussion with the Regional Government of Fakfak Regency in the Framework of a Jurisdiction Approach

On the 28th of July 2022, Fathan Oktrisaf, representing the PISAgro Secretariat to attend a limited discussion with the Regional Government of Fakfak Regency organized by the INOBU Foundation at the Pullman Hotel, Menteng, Central Jakarta.

This event was attended by representatives of the INOBU Foundation, the Regent of Fakfak, Untung Tamsil, as well as representatives of the Fakfak Regency Government. On this occasion, an achievement was produced in the form of Cooperation Minutes of Multi-stakeholder Meetings as evidence of synergy to support sustainable agriculture in Fakfak Regency.

HAMBATAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PEREMAJAAN TANAMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, KOPI, KAKAO, KARET

(Disusun oleh Ferial Lubis, PISAgro dari berbagai sumber)

Produktivitas Dan Potensi Luas Peremajaan Tanaman Perkebunan

Produktivitas tanaman perkebunan saat ini rendah, contohnya: produktivitas kopi 0,78 ton/ha; kakao 0,80 ton/ha, karet 1,2 ton/ha, sawit 3,1 ton/ha. Hal ini disebabkan karena umur tanaman yang sudah tua rata-rata lebih dari 25 tahun, atau dulu ditanam dengan bibit yang kualitasnya kurang baik atau tidak bersertifikat dan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) budidaya yang masih rendah. Sedangkan potensi peremajaan atau rehabilitasi tanaman perkebunan rakyat sangat luas.

Pada Tabel 1 dibawah ini dapat dilihat perbandingan data produktivitas kelapa sawit, kopi, kakao dan karet posisi saat ini dan potensi untuk peningkatan produktivitas. Sebagai contoh kakao produktivitas saat ini 756 kg/ha, melalui program peremajaan/rehabilitasi tanaman kakao maka produktivitas dapat meningkat sehingga diharapkan dapat mencapai 2.000 kg/ha.

Tabel 1. Perbandingan Produktivitas Saat ini dan Potensi Peningkatan Produktivitas

| No | Komoditas | Produktivitas Saat Ini (kg/ha) | Potensi (kg/ha) |
|----|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Kelapa sawit | 3.644 | 7.530 |
| 2 | Kopi | 782 | 2.500 |
| 3 | Kakao | 756 | 2.000 |
| 4 | Karet | 1.161 | 1.670 |

Sumber: Ditjen Perkebunan

Kementerian Pertanian dan *Center for Indonesian Policy Studies* menyatakan ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan produktivitas tanaman kopi, karet, sawit dan kakao serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan berkelanjutan (Tabel 2).

Tabel 2. Permasalahan & Tantangan Pengembangan Berkelanjutan Pada Tanaman Kopi, Karet, Sawit & Kakao

| Tanaman | Permasalahan | Tantangan Pengembangan Berkelanjutan |
|---------|---|--|
| Kopi | Produktivitas rendah karena: <ul style="list-style-type: none">penggunaan pupuk yang tidak sesuai kebutuhan akibat kenaikan harga pupukAdanya penyakit pengerek buah kopi. | Partisipasi petani dalam standar dan sertifikasi (Common Code for Coffee Community) relatif rendah. |
| Karet | Kualitas karet Indonesia yang tidak dapat memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh ISO 2000:2014. | Telah disusun Platform Karet Alam Berkelanjutan untuk Indonesia (SNARPI) guna memastikan aspek keberlanjutan produksi karet Indonesia. |

| Tanaman | Permasalahan | Tantangan Pengembangan Berkelanjutan |
|---------|---|--|
| Sawit | Produktivitas rendah karena penggunaan pupuk yang lebih rendah daripada kebutuhan yang disebabkan oleh kenaikan harga pupuk. | Petani kecil mengelola 40% dari total area perkebunan, tetapi hanya 0,21% dari area yang disertifikasi sebagai berkelanjutan di bawah Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). |
| Kakao | Kualitas kakao Indonesia tidak mencapai standar yang ditetapkan oleh "ISO 2451 Biji Kakao – Spesifikasi dan Persyaratan Mutu" | Cocoa Sustainability Partnership menjangkau 211.000 petani. Tantangan harga, modal, produksi rendah, dan kurangnya pengetahuan tetap ada. |

Sumber: Kementerian Pertanian 2021 & CIPS

Mengingat tanaman perkebunan (kopi, karet, sawit dan kakao) sebagian besar sudah berumur tua (rata-rata lebih dari 25 tahun) maka Kementerian Pertanian sejak tahun 2005 menerapkan program peremajaan tanaman perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan menyusun potensi luasan areal perkebunan yang dapat diterapkan program peremajaan/rehabilitasi tanaman perkebunan mulai tahun 2019 sampai dengan 2022. Pada Tabel 3 dapat dilihat potensi luasan area perkebunan yang dapat diterapkan untuk program peremajaan/rehabilitasi kelapa sawit, kopi, kakao, karet (ha) dan perkiraan jumlah benih yang dibutuhkan. Contohnya luasan area tanaman karet yang berpotensi untuk mengikuti program peremajaan/rehabilitasi seluas minimal 564.610 ha dengan jumlah kebutuhan benih diperkirakan 282 juta batang selama tahun 2019-2022.

Tabel 3. Potensi Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Tahun 2019-2022

| No | Komoditas | Potensi peremajaan/Rehabilitasi (ha) | Kebutuhan Benih (juta batang) |
|----|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Kelapa sawit | 500.000 | 75 |
| 2 | Kopi | 317.160 | 317 |
| 3 | Kakao | 306.880 | 307 |
| 4 | Karet | 564.610 | 282 |

Sumber: Ditjen Perkebunan

Permasalahan Pelaksanaan Program PSR Kelapa Sawit

Total luas kebun kelapa sawit saat ini 16,38 juta ha diantaranya seluas 6,94 juta ha adalah luasan sawit rakyat. Seluas 2,8 juta tanaman kelapa sawit dari total luasan 16,38 juta ha berpotensi untuk mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) agar produktivitas meningkat dengan rincian: Plasma dan swadaya 2,29 jt ha + Plasma PIRBUN 0,14 juta ha + Plasma PIR-TRANS/PIR-KKPA 0,37 jt ha.

Tabel 4. Target dan Realisasi Pelaksanaan PSR

| No | Tahun | Target PSR (ha) | Realisasi (ha) | (%) |
|----|-------|-----------------|----------------|-------|
| 1 | 2017 | 20.780 | 13.206 | 63,55 |
| 2 | 2018 | 185.000 | 35.196 | 19,02 |
| 3 | 2019 | 180.000 | 88.339 | 49,08 |
| 4 | 2020 | 180.000 | 91.995 | 51,11 |
| 5 | 2021 | 180.000 | 27.747 | 15,42 |
| 6 | 2022 | 180.000 | 2.171 | 1,21 |

Sumber: Ditjen Perkebunan, 24 Juni 2022

Dari total luas kebun kelapa sawit saat ini 16,38 juta ha diantaranya seluas 3,2 juta - 3,4 juta ha yang terdapat di kawasan hutan yang belum jelas pemiliknya dan Kementerian LHK belum memiliki datanya sehingga petani sawit belum mendapatkan hak pelepasan kawasan dari Kementerian LHK.

Permasalahan lainnya menurut Ketua APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) adalah sebanyak 84% petani sawit gagal usul dalam pengajuan PSR, penyebabnya adalah adanya klaim kebun sawit di kawasan hutan padahal sawit sudah berumur lebih 20 tahun, sudah punya surat dan sudah berdomisili disitu namun masih tetap disebut kawasan hutan.

Lebih lanjut Ketua APKASINDO menyatakan kerugian dan resiko akibat adanya tumpang tindih overlap lahan antara tata ruang dan kehutanan adalah:

- Dari 3,4 juta ha luasan kebun sawit yang ada dalam kawasan hutan tersebut 78% adalah petani sawit artinya petani akan phase out dari industry sawit bila tidak segera diselamatkan;
- Negara akan rugi karena ekspor CPO akan menurun. Sawit yang dikelola 42% berasal dari TBS petani. Petani dalam kawasan hutan tidak dapat ikut program PSR sehingga harus meninggalkan industry tersebut. Hal ini akan sangat nyata berhubungan dengan produksi CPO nasional.
- Akan muncul konflik ekonomi di level menengah kebawah, akan menjadi masalah dari segi hukum, sosial dan ekonomi.

Sedangkan BPK menemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan PSR adalah:

- Persyaratan belum dapat dipenuhi sepenuhnya seperti identitas pekebun (NIK yang tidak valid, mengajukan lebih dari 4 ha, kebun yang berada di kawasan hutan sehingga tumpang tindih dengan hal-hal pertanahan lainnya;
- Pemanfaatan dana oleh pekebun bukan untuk replanting tapi untuk tujuan lainnya.

Karet

Data menunjukkan produktivitas karet di Indonesia (1.073 kg/ha) paling rendah dibandingkan negara

ASEAN lainnya, seperti Malaysia rata-rata produktivitasnya 1.433 kg/ha, Thailand 1.469 kg/ha dan tertinggi Vietnam sebesar 1.691 kg/ha.

Tahun 2020 (angka sementara) produksi karet Indonesia cenderung menurun sejak tahun 2017 - 2020 walaupun luas areal meningkat

Dari luas areal 3.676.035 Ha sebesar 89% adalah PR, 4% PBN dan 7% PBS. Dari 3.301.405 ton produksi, 89% dihasilkan PR, 4% dihasilkan PBN dan 7% dihasilkan PBS (Tabel 5). Menurut buku Statistic Perkebunan 2017-2021, produktivitas tanaman karet tahun 2017-2020* terus menurun masing-masing: 1.205 kg/ha, 1.161 kg/ha, 1.025 kg/ha dan 1.018 kg/ha.

**Tabel 5. Luas Areal dan Produksi Karet Kering
Menurut Status Pengusahaan
Tahun 2017-2021**

| Tahun | Luas Areal (Ha) | | | Produksi (Ton) | | | Jumlah |
|--------|-----------------|---------|---------|------------------|-----------|---------|---------|
| | PR | PBN | PBS | PR | PBN | PBS | |
| 2017 | 3.103.271 | 233.086 | 322.733 | 3.659.090 | 3.050.232 | 249.286 | 380.910 |
| 2018 | 3.235.761 | 189.576 | 246.050 | 3.671.387 | 3.111.253 | 230.361 | 288.743 |
| 2019 | 3.269.078 | 165.467 | 241.491 | 3.676.036 | 2.926.613 | 129.459 | 245.333 |
| 2020* | 3.305.359 | 138.553 | 237.212 | 3.681.124 | 2.533.497 | 137.668 | 213.480 |
| 2021** | 3.316.047 | 138.594 | 237.710 | 3.692.351 | 2.760.886 | 140.257 | 220.332 |

Sumber: Statistik Ditjen Perkebunan 2019-2021

* Sementara, ** Estimasi

PR = Perkebunan Rakyat; PBN = Perkebunan Besar Negara ; PBS=Perkebunan Besar Swasta

PT Kirana Megatara (produsen *crumb rubber* terbesar di Indonesia yang menguasai lebih dari 18 persen pangsa pasar nasional) menyatakan penyebab rendahnya produktivitas Karet Alam di Indonesia adalah:

- Tingginya populasi pohon yang sudah tua dan rusak;
- Pohon yang tumbuh penuh sesak dengan jarak tanam yang tidak teratur;
- Tingkat penanaman kembali/peremajaan pohon karet yang rendah
- Bahan tanam yang buruk
- Belum memperhatikan faktor keberlanjutan.

Dalam usaha meningkatkan produksi dan produktivitas, Ditjen Perkebunan menetapkan tiga program yang dilakukan setiap tahun yaitu: Perluasan tanaman karet, Peremajaan tanaman karet dan Intensifikasi tanaman karet.

Dalam pelaksanaan penanaman kembali/peremajaan tanaman karet secara massive ditemui beberapa kendala yaitu:

- Kurangnya ketersediaan bibit unggul yang telah diverifikasi;
- Pasar bibit kurang berkembang
- Biaya yang terlalu mahal untuk kebanyakan petani kecil
- 50% investasi di tahun pertama
- Adanya penyakit akar tanaman yang perlu

- perlakuan khusus sebelum ditanam
f. Kurangnya infrastruktur jalan beraspal kedaerah terpencil
g. Penting untuk mengekstraksi kayu karet yang ditebang.

Sedangkan tantangan penanaman karet kembali/replanting adalah:

- Dampak pergerakan harga karet mempengaruhi dorongan untuk penanaman kembali/ replanting sampai tingkat tertentu;
- Adanya daya tarik untuk mengkonversi ke tanaman yang lebih menjanjikan, seperti kelapa sawit;
- Solusi praktis untuk mengatasi penyebaran penyait daun - pestalotiopsis
- Perubahan iklim.

Dalam rangka mengatasi kendala dan menghadapi tantangan tersebut diatas, Ditjen Perkebunan menetapkan strategi dan program untuk pelaksanaan percepatan peremajaan tanaman karet rakyat yaitu:

- Menginventarisasi lahan perkebunan karet rakyat
- Membangun *nursery* benih karet
- Menerapkan pola diversifikasi tanaman karet dengan tanaman lainnya
- Menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani karet
- Memfasilitasi pembiayaan (APBN, APBD, KUR dan sumber dana lainnya).

Ditjen Perkebunan menetapkan target peremajaan karet Indonesia 2019 – 2027 seluas 700.000 ha dengan lokasi sebagai berikut:

Tabel 6. Target Peremajaan Karet Indonesia 2019 – 2027 (700.000 Ha)

| No | Propinsi | Luas (Ha) | No | Propinsi | Luas (Ha) |
|----|------------------|-----------|----|--------------------|-----------|
| 1 | Aceh | 56.000 | 8 | Lampung | 52.000 |
| 2 | Sumatera Utara | 56.000 | 9 | Kep.Riau | 13.000 |
| 3 | Riau | 56.000 | 10 | Bangka Belitung | 9.000 |
| 4 | Sumatera Barat | 56.000 | 11 | Kalimantan Barat | 56.000 |
| 5 | Jambi | 56.000 | 12 | Kalimantan Timur | 56.000 |
| 6 | Bengkulu | 56.000 | 13 | Kalimantan Selatan | 56.000 |
| 7 | Sumatera Selatan | 56.000 | 14 | Kalimantan Tengah | 56.000 |

Sumber: Ditjen Perkebunan

Kakao

Dalam beberapa tahun terakhir luas areal, produksi dan produktivitas tanaman kakao mengalami penurunan.

Tabel 7. Produktivitas tanaman kakao tahun 2017-2020* (kg/Ha)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|------------|------|------|------|-------|
| PR | 730 | 731 | 724 | 710 |
| PBN | 973 | 781 | 347 | 231 |
| PBS | 943 | 612 | 492 | 440 |

Sumber: Buku Statistik Ditjen Perkebunan 2019-2021

Dari luas areal tanaman kakao 1.560.944 ha, sebesar 98,83% PR, 0,69% PBS dan PBN 0,48%. Luas areal kakao menunjukkan penurunan setiap tahun (2017-2021**). Produksi kakao 734.797 ton (2019) sebesar 99,26% dihasilkan PR, 0,22% PBN dan 0,52% dihasilkan PBS.

Tabel 8. Luas Areal dan Produksi Kakao Menurut Status Pengusahaan Tahun 2017-2021

| Tahun | Luas Areal (Ha) | | | Jumlah | Produksi (Ton) | | | Jumlah |
|--------|-----------------|--------|--------|------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| | PR | PBN | PBS | | PR | PBN | PBS | |
| 2017 | 1.615.955 | 14.944 | 27.522 | 1.658.421 | 558.813 | 12.612 | 19.258 | 590.683 |
| 2018 | 1.584.133 | 12.384 | 14.497 | 1.611.014 | 751.685 | 7.715 | 7.880 | 767.280 |
| 2019 | 1.542.704 | 7.499 | 10.741 | 1.560.944 | 729.371 | 1.620 | 3.806 | 734.797 |
| 2020* | 1.509.307 | 7.781 | 11.295 | 1.528.383 | 708.634 | 983 | 3.760 | 713.377 |
| 2021** | 1.478.777 | 7.624 | 11.067 | 1.497.468 | 723.205 | 1.004 | 3.837 | 728.046 |

Sumber: Statistik Ditjen Perkebunan 2019-2021

* Sementara, ** Estimasi

PR = Perkebunan Rakyat; PBN = Perkebunan Besar Negara ; PBS=Perkebunan Besar Swasta

Kondisi pertanaman kakao nasional dicirikan dengan tiga permasalahan utama yaitu:

- Produktivitas rata-rata nasional di bawah potensi,
 - Perkebunan Rakyat > 98,75%
 - Tanaman tua/rusak/tidak produktif 16,26%
 - Pemeliharaan kurang intensif
 - Inkonsistensi penerapan GAP
 - Serangan OPT utama
 - Dampak perubahan iklim
 - Sarana produksi tidak tersedia (jumlah & waktu)
- Kualitas produk masih rendah:
 - Manajemen panen dan pasca panen belum optimal
 - Sarana kurang memadai
 - Belum fermentasi (<10%)
 - Produk tidak seragam kualitasnya
 - Belum ada insentif harga
 - Kurangnya inovasi teknologi
- Kelembagaan petani lemah:
 - Petani bekerja secara individual
 - Lemah permodalan & akses pembiayaan
 - Posisi tawar rendah
 - Capacity building masih kurang
 - Belum terjalin kemitraan usaha
 - Lemahnya kapasitas & kapabilitas SDM
 - Lemahnya pendataan

Tantangan yang teridentifikasi bagi petani kecil kakao: a. 16,26% tanaman kakao tidak produktif, sudah tua dan terserang penyakit;

- b. Petani kakao cenderung menjual biji kakao mentah yang tidak diferentiasi daripada yang diferentiasi, hal ini menyebabkan nilai tambah yang lebih rendah;
- c. Tidak adanya kontrol kualitas atas produksi dari petani kakao;
- d. Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) yang tidak konsisten;
- e. Kurangnya akses modal untuk melakukan inovasi;
- f. Rendahnya pembentukan Kelompok/Gapoktan petani kakao;
- g. Kemitraan perusahaan terbatas, peningkatan kemampuan terbatas, peningkatan kapasitas, dan penerapan teknologi baru oleh petani kakao yang juga terbatas.

Strategi pengembangan komoditas kakao yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan adalah:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas berbasis Kawasan: Perluasan, Peremajaan, Rehabilitasi, Intensifikasi, Implementasi GAP, Penerapan inovasi teknologi perbenihan;

2. Peningkatan nilai tambah & daya saing: Tumpangsari, Integrasi ternak, Agrowisata perkebunan;
3. Perbaikan panen dan pasca panen: Inovasi & teknologi pasca panen, Diversifikasi produk, Peningkatan mutu biji (fermentasi);
4. Peningkatan kemampuan SDM: Pelatihan teknis & manajerial, Pendampingan & penyuluhan;
5. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha: Penguatan Kelembagaan (korporasi petani), Manajemen kemitraan usaha hulu-hilir, Sinergitas Kelembagaan penelitian.

Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan 4 kegiatan pengembangan kakao yaitu: intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan perluasan.

Tabel 9. Kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao

| Kegiatan (ha) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Intensifikasi | 65.000 | 15.900 | 61.160 | 16.930 | - | 20.700 | 8.135 | 72.470 | - | 1.030 | - | - | - |
| Rehabilitasi | 59.500 | 28.613 | 64.480 | 39.150 | 27.050 | 4.257 | 31.875 | - | - | - | - | - | - |
| Peremajaan | 20.000 | 14.920 | 40.360 | 4.900 | - | 8.025 | 5.025 | 7.901 | 5.475 | 8.690 | 6.660 | 4.250 | 2.975 |
| Perluasan | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 900 | 2.080 | 1.340 | 740 | 200 |
| Jumlah | 144.500 | 59.433 | 166.000 | 60.980 | 27.050 | 32.982 | 45.035 | 82.021 | 6.375 | 11.800 | 8.000 | 4.990 | 3.175 |

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan

Kopi

Usaha perkebunan kopi di Indonesia sebagian besar merupakan perkebunan rakyat (96%), bersifat produktivitasnya masih rendah, permodalan usaha masih rendah, kurang menerapkan kultur teknis yang intensif yang menyebabkan rendahnya tingkat produksi dan pendapatan petani. Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan luas areal tanaman kopi, produksi dan

produktivitas mengalami fluktuatif.

Kesimpulan:

Pengembangan komoditas perkebunan memerlukan kerjasama semua pihak baik pemerintah – swasta – Pemda/SKPD – Perguruan Tinggi/Peneliti dengan fungsi dan peranan masing-masing.

| No | Materi | Pihak terkait |
|----|---|---|
| 1 | Regulasi dan kebijakan | Kemenko-Eko, Bappena, BPN, KemenLHK, Kemendag, Kemenperin, KemenBUMN, Kementan, Pemda/SKPD. |
| 2 | Integrasi onfarm-offfarm industry pengolahan | Kemenperin, KemenBUMN, Kemenko-Eko, Pemda/SKPD |
| 3 | Praktek Budidaya Yang Baik (GAP) | Kementan, Pemda/SKPD |
| 4 | Daya Dukung Lahan | Kementan, KemenLHK, KemenATR/BPN, Pemda/SKPD |
| 5 | Ketersediaan benih unggul, alsinstant dan sarana produksi | Kementan, Pemda/SKPD |
| 6 | Infrastruktur dan konektivitas | Kementan, KemenPUPR, Kemenhub, Pemda/SKPD |
| 7 | Stabilisasi harga | Kemendag, Kemenko-Eko, Kementan |
| 8 | SDM dan Kembangkan Petani | Kementan, Kemenko, Kemendagri, Pemda/SKPD |
| 9 | Aspek pembiayaan | KemenKEU, Kemenko-Eko, Kementan, Swasta |
| 10 | Inovasi dan teknologi | Kementan, Pemda/SKPD, Perguruan Tinggi/ Peneliti |

Sumber: Ditjen Perkebunan
No 3 dan 5 merupakan Tupoksi langsung Kementan.
No Lainnya merupakan Tupoksi Untas sektoral



CHALLENGES AND STRATEGIES FOR ACCELERATE REGULATION OF OIL PALM, COFFEE, COCOA, RUBBER PLANTATIONS

(Written by Ferial Lubis, PISAgro from multiple sources)

Productivity and Extensive Potential of Plantation Rejuvenation

The productivity of plantation crops is currently low, for example: coffee productivity 0.78 tons/ha; cocoa 0.80 tons/ha, rubber 1.2 tons/ha, palm oil 3.1 tons/ha. This is because the average age of the old plants is more than 25 years, or previously planted with seeds of poor quality or not certified and the application of Good Agricultural Practices (GAP) cultivation is still low. Meanwhile, the potential for rejuvenation or rehabilitation of people's plantations is very wide.

In Table 1 below, you can see a comparison of the productivity data of oil palm, coffee, cocoa and rubber, the current position and the potential for increasing productivity. For example, the current cocoa productivity is 756 kg/ha, through the cocoa plant rejuvenation/rehabilitation program, productivity can be increased so that it is expected to reach 2,000 kg/ha.

Table 1. Comparison of Current Productivity and Potential for Increased Productivity

| No | Commodities | Recent Productivity (kg/ha) | Potentials (kg/ha) |
|----|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Palm Oil | 3.644 | 7.530 |
| 2 | Coffee | 782 | 2.500 |
| 3 | Cocoa | 756 | 2.000 |
| 4 | Rubber | 1.161 | 1.670 |

Source: Ditjen Perkebunan

The Ministry of Agriculture and the Center for Indonesian Policy Studies stated that there are several problems faced in increasing the productivity of coffee, rubber, oil palm and cocoa plants as well as challenges faced in sustainable development (Table 2).

Table 2. Problems and Challenges of Sustainable

| Crops | Problems | Sustainable Development Challenges |
|--------|---|--|
| Coffee | Low productivity due to: <ul style="list-style-type: none"> Inappropriate use of fertilizers due to the increase in fertilizer prices The presence of coffee berry borer disease. | Farmers' participation in standards and certification (Common Code for Coffee Community) is relatively low. |
| Rubber | The quality of Indonesian rubber that cannot meet the international standards set by ISO 2000:2014. | The Sustainable Natural Rubber Platform for Indonesia (SNARPI) has been prepared to ensure the sustainability aspects of Indonesian rubber production. |

| Crops | Problems | Sustainable Development Challenges |
|----------|--|---|
| Palm Oil | Low productivity due to the use of fertilizers that are lower than the demand caused by the increase in fertilizer prices. | Smallholders manage 40% of the total plantation area, but only 0.21% of the area is certified as sustainable under the Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). |
| Cocoa | The quality of Indonesian cocoa does not meet the standards set by "ISO 2451 Cocoa Beans – Quality Specifications and Requirements." | The Cocoa Sustainability Partnership reaches 211,000 farmers. The challenges of price, capital, low production, and lack of knowledge remain. |

Source: Ministry of Agriculture 2021 & CIPS

Considering that most of the plantation crops (coffee, rubber, oil palm and cocoa) are old (an average of more than 25 years), the Ministry of Agriculture has implemented a plantation plant rejuvenation program since 2005.

The Directorate General of Plantations compiles the potential area of plantations that can be applied to the rejuvenation/rehabilitation program for plantation crops from 2019 to 2022. Table 3 shows the potential area of plantations that can be applied to the rejuvenation/rehabilitation program for oil palm, coffee, cocoa, rubber (ha) and the estimated number of seeds needed. For example, the area of rubber plants that have the potential to participate in the rejuvenation/rehabilitation program is a minimum of 564,610 ha with an estimated total seed requirement of 282 million stems during 2019-2022.

Table 3. Potential for Rejuvenation and Rehabilitation of Plantation Plants in 2019-2022

| No | Commodities | Recent Productivity (kg/ha) | Potentials (kg/ha) |
|----|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Palm Oil | 3.644 | 7.530 |
| 2 | Coffee | 782 | 2.500 |
| 3 | Cocoa | 756 | 2.000 |
| 4 | Rubber | 1.161 | 1.670 |

Source: Ditjen Perkebunan

PSR Program Implementation Problems - Palm oil

The total area of oil palm plantations is currently 16.38 million ha, of which 6.94 million ha is the area of smallholder palm oil. An area of 2.8 million oil palm plants from a total area of 16.38 million ha has the potential to participate in the People's

Palm Oil Replanting (PSR) program so that productivity increases with details: Plasma and self-help 2.29 million ha + Plasma PIRBUN 0.14 million ha + Plasma PIR-TRANS/PIR-KKPA 0.37 million ha.

Table 4. Targets and Realization of PSR Implementation

| No | Year | PSR Targets (ha) | Realisation (ha) | (%) |
|----|------|------------------|------------------|-------|
| 1 | 2017 | 20.780 | 13.206 | 63,55 |
| 2 | 2018 | 185.000 | 35.196 | 19,02 |
| 3 | 2019 | 180.000 | 88.339 | 49,08 |
| 4 | 2020 | 180.000 | 91.995 | 51,11 |
| 5 | 2021 | 180.000 | 27.747 | 15,42 |
| 6 | 2022 | 180.000 | 2.171 | 1,21 |

Source: Ditjen Perkebunan, 24 June 2022

Of the total area of oil palm plantations currently 16.38 million ha of which 3.2 million - 3.4 million ha are located in forest areas whose owners are not yet clear and the Ministry of Environment and Forestry does not yet have the data so that oil palm farmers have not received the right to release the area from the Ministry of Environment and Forestry. LHK.

Another problem, according to the Chairman of APKASINDO (Association of Indonesian Palm Oil Farmers) is that as many as 84% of oil palm farmers failed to submit a proposal for PSR, the cause was the existence of claims for oil palm plantations in forest areas even though oil palm was more than 20 years old, already had a letter and was domiciled there but still called forest area.

Furthermore, the Chairman of APKASINDO stated that the losses and risks due to overlapping land overlap between spatial planning and forestry are:

- a. Of the 3.4 million ha of oil palm plantations in the forest area, 78% are oil palm farmers, meaning that farmers will phase out of the palm oil industry if they are not rescued immediately;
- b. The state will lose because CPO exports will decline. 42% of the managed palm oil comes from farmers' FFB. Farmers in forest areas cannot participate in the PSR program so they have to leave the industry. This will be very clearly related to national CPO production.
- c. There will be economic conflicts at the lower middle level, which will become legal, social and economic problems.

Meanwhile, BPK found several problems in the implementation of PSR, namely:

- a. The requirements have not been fully fulfilled, such as the identity of the planter (invalid NIK, applying for more than 4 ha, plantations located in forest areas so they overlap with other land matters;

b. The use of funds by planters is not for replanting but for other purposes.

Rubber

Data shows that rubber productivity in Indonesia (1,073 kg/ha) is the lowest compared to other ASEAN countries, such as Malaysia with an average productivity of 1,433 kg/ha, Thailand with 1,469 kg/ha and the highest in Vietnam at 1,691 kg/ha.

In 2020 (temporary figures) Indonesian rubber production tends to decline from 2017 - 2020 even though the area is increasing

Of the total area of 3,676,035 Ha, 89% are PR, 4% are PBN and 7% are PBS. From 3,301,405 tons of production, 89% produced PR, 4% produced PBN and 7% produced PBS (Table 5). According to the 2017-2021 Plantation Statistics book, the productivity of rubber plants in 2017-2020* continued to decline, respectively: 1,205 kg/ha, 1,161 kg/ha, 1,025 kg/ha and 1,018 kg/ha.

Table 5. Area and Dry Rubber Production by Concession Status Year 2017-2021

| Tahun | Luas Areal (Ha) | | | Jumlah | Produksi (Ton) | | | Jumlah |
|--------|-----------------|---------|---------|-----------|----------------|---------|---------|-----------|
| | PR | PBN | PBS | | PR | PBN | PBS | |
| 2017 | 3.103.271 | 233.086 | 322.733 | 3.659.090 | 3.050.232 | 249.286 | 380.910 | 3.680.428 |
| 2018 | 3.235.761 | 189.576 | 246.050 | 3.671.387 | 3.111.253 | 230.361 | 288.743 | 3.630.357 |
| 2019 | 3.269.078 | 165.467 | 241.491 | 3.676.036 | 2.926.613 | 129.459 | 245.333 | 3.301.405 |
| 2020* | 3.305.359 | 138.553 | 237.212 | 3.681.124 | 2.533.497 | 137.668 | 213.480 | 2.884.645 |
| 2021** | 3.316.047 | 138.594 | 237.710 | 3.692.351 | 2.760.886 | 140.257 | 220.332 | 3.121.475 |

Sumber: Statistik Ditjen Perkebunan 2019-2021

* Sementara, ** Estimasi

PR = Perkebunan Rakyat; PBN = Perkebunan Besar Negara ; PBS=Perkebunan Besar Swasta

PT Kirana Megatara (the largest crumb rubber producer in Indonesia which controls more than 18 percent of the national market share) stated that the causes of the low productivity of Natural Rubber in Indonesia are:

- a. High population of old and damaged trees;
- b. Crowded growing trees with irregular spacing;
- c. Low rate of replanting/rejuvenation of rubber trees
- d. Bad planting material
- e. Not paying attention to the sustainability factor.

In an effort to increase production and productivity, the Directorate General of Plantations establishes three programs that are carried out every year, namely: Expansion of rubber plants, Rejuvenation of rubber plants and Intensification of rubber plants.

In implementing the massive replanting / rejuvenation of rubber plants, several obstacles were encountered, namely:

- a. Lack of availability of verified superior seeds;
- b. The seed market is underdeveloped
- c. Too expensive for most small farmers

- d. 50% investment in the first year
- e. There are plant root diseases that need special treatment before planting
- f. Lack of paved road infrastructure in remote areas
- g. It is necessary to extract the felled rubber wood.

Meanwhile, the challenges of replanting rubber are:

- a. The impact of rubber price movements affects the impetus for replanting to some extent;
- b. There is an attraction to convert to more promising crops, such as oil palm;
- c. Practical solution to overcome the spread of leaf disease - Pestalotiopsis
- d. Climate change.

In order to overcome the obstacles and face the challenges mentioned above, the Directorate General of Plantations has established strategies and programs to accelerate the rejuvenation of smallholder rubber plants, namely:

- a. Inventory of smallholder rubber plantation land
- b. Build a rubber seed nursery
- c. Applying the pattern of diversification of rubber plants with other crops
- d. Growing and strengthening rubber farmer institutions
- e. Facilitating financing (APBN, APBD, KUR and other sources of funds).

The Directorate General of Plantations has set a target for replanting Indonesian rubber for 2019-2027 covering an area of 700,000 ha with the following locations:

**Table 6. Indonesian Rubber Rejuvenation Target
2019 – 2027 (700,000 Ha)**

| No | Province | Area (Ha) | No | Province | Area (Ha) |
|----|----------------|-----------|----|--------------------|-----------|
| 1 | Aceh | 56.000 | 8 | Lampung | 52.000 |
| 2 | North Sumatera | 56.000 | 9 | Riau Islands | 13.000 |
| 3 | Riau | 56.000 | 10 | Bangka Belitung | 9.000 |
| 4 | West Sumatera | 56.000 | 11 | West Kalimantan | 56.000 |
| 5 | Jambi | 56.000 | 12 | East Kalimantan | 56.000 |
| 6 | Bengkulu | 56.000 | 13 | South Kalimantan | 56.000 |
| 7 | South Sumatera | 56.000 | 14 | Central Kalimantan | 56.000 |

Source: Ditjen Perkebunan

Cocoa

In recent years the area, production and productivity of cocoa plants have decreased.

Table 7. Cocoa crop productivity in 2017-2020*

(kg/Ha)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|-----|------|------|------|-------|
| PR | 730 | 731 | 724 | 710 |
| PBN | 973 | 781 | 347 | 231 |
| PBS | 943 | 612 | 492 | 440 |

Source: Statistical Book of ~~Ditjen~~ Perkebunan 2019-2021

From the total area of cocoa plantations 1,560,944 ha, 98.83% PR, 0.69% PBS and 0.48% PBN. Cocoa area shows a decrease every year (2017-2021**). Cocoa production of 734,797 tons (2019) was 99.26% produced by PR, 0.22% PBN and 0.52% produced by PBS.

Table 8. Area and Cocoa Production by Business Status in 2017-2021

| Tahun | Luas Areal (Ha) | | | Jumlah | Produksi (Ton) | | | Jumlah |
|--------|-----------------|--------|--------|------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| | PR | PBN | PBS | | PR | PBN | PBS | |
| 2017 | 1.615.955 | 14.944 | 27.522 | 1.658.421 | 558.813 | 12.612 | 19.258 | 590.683 |
| 2018 | 1.584.133 | 12.384 | 14.497 | 1.611.014 | 751.685 | 7.715 | 7.880 | 767.280 |
| 2019 | 1.542.704 | 7.499 | 10.741 | 1.560.944 | 729.371 | 1.620 | 3.806 | 734.797 |
| 2020* | 1.509.307 | 7.781 | 11.295 | 1.528.383 | 708.634 | 983 | 3.760 | 713.377 |
| 2021** | 1.478.777 | 7.624 | 11.067 | 1.497.468 | 723.205 | 1.004 | 3.837 | 728.046 |

Sumber: Statistik Ditjen Perkebunan 2019-2021

* Sementara, ** Estimasi

PR = Perkebunan Rakyat; PBN = Perkebunan Besar Negara ; PBS=Perkebunan Besar Swasta

The condition of national cocoa plantations is characterized by three main problems, namely:

a. The national average productivity is below potential,

- People's Plantation > 98.75%
- Old/damaged/unproductive plants 16.26%
- Less intensive maintenance
- Inconsistency in the application of GAP
- Major OPT attacks
- Climate change impacts
- Production facilities are not available (amount & time)

b. Product quality is still low:

- Harvest and post-harvest management is not optimal
- Inadequate facilities
- Not yet fermented (<10%)
- Products are not uniform in quality
- No price incentive yet
- Lack of technological innovation

c. Weak farmer institutions:

- Farmers work individually
- Weak capital & access to finance
- Low bargaining position
- Capacity building is still lacking
- Not yet established a business partnership
- Weak HR capacity & capability
- Weak data collection

Challenges identified for small cocoa farmers:

- a. 16.26% of cocoa plants are unproductive, old and diseased;
- b. Cocoa farmers tend to sell unfermented raw cocoa beans rather than fermented ones, leading to lower value added;
- c. Lack of quality control over the production of cocoa farmers;

- d. Inconsistent application of Good Agricultural Practices (GAP);
- e. Lack of access to capital to innovate;
- f. The low formation of groups/Gapoktan for cocoa farmers;
- g. Limited company partnerships, limited capacity building, capacity building, and limited adoption of new technologies by cocoa farmers.

The cocoa commodity development strategy set by the Directorate General of Plantations is:

1. Area-based production and productivity improvement: Expansion, Rejuvenation, Rehabilitation, Intensification, Implementation of GAP, Application of seed technology innovation;
2. Increasing added value & competitiveness: intercropping, integration of livestock, plantation agro-tourism;
3. Harvest and post-harvest improvements: Post-harvest innovation & technology, Product diversification, Improved seed quality (fermentation);
4. Capacity building of HR: Technical & managerial training, Mentoring & counseling;
5. Institutional development and business partnerships: Institutional strengthening (farmer corporations), Management of upstream-downstream business partnerships, Research Institutional Synergy.

The Directorate General of Plantations determines 4 cocoa development activities, namely: intensification, rehabilitation, rejuvenation and expansion.

Table 9. Cocoa Crop Development Activities

| Kegiatan (ha) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Intensifikasi | 65.000 | 15.900 | 61.160 | 16.930 | - | 20.700 | 8.135 | 72.470 | - | 1.030 | - | - | - |
| Rehabilitasi | 59.500 | 28.613 | 64.480 | 39.150 | 27.050 | 4.257 | 31.875 | - | - | - | - | - | - |
| Pemrajaan | 20.000 | 14.920 | 40.360 | 4.900 | - | 8.025 | 5.025 | 7.901 | 5.475 | 8.690 | 6.660 | 4.250 | 2.975 |
| Perluasan | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 900 | 2.080 | 1.340 | 740 | 200 |
| Jumlah | 144.500 | 59.433 | 166.000 | 60.980 | 27.050 | 32.982 | 45.035 | 82.021 | 6.375 | 11.800 | 8.000 | 4.990 | 3.175 |
| Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan | | | | | | | | | | | | | |

Coffee

Most of the coffee plantation businesses in Indonesia are smallholder plantations (96%), with low productivity, low business capital, and lack of intensive technical culture that causes low levels of production and farmers' income. In recent years the development of coffee plantation area, production and productivity has fluctuated.

Conclusion:

The development of plantation commodities requires the cooperation of all parties, both government – private – Local Government/SKPD – Universities/Researchers with their respective functions and roles.

| No | Materials | Pihak terkait |
|----|--|---|
| 1 | Regulations and policies | Kemenko-Eko, Bappenas, BPN, KemenLHK, Kemendag, Kemenperin, KemenBUMN, Kementan, Pemda/ SKPD. |
| 2 | Onfarm-offfarm integration of processing industry | Kementan, KemenBUMN, Kemenko-Eko, Pemda/ SKPD |
| 3 | Good Cultivation Practices (GAP) | Kementan, Pemda/SKPD |
| 4 | Land Carrying Capacity | Kementan, KemenLHK, KemenATR/ BPN, Pemda/ SKPD |
| 5 | Availability of superior seeds, agricultural machinery and production facilities | Kementan, Pemda/ SKPD |
| 6 | Infrastructure and connectivity | Kementan, KemenPUPR, Kemenhub, Pemda/ SKPD |
| 7 | Price stabilization | Kemendag, Kemenko-Eko, Kementan |
| 8 | Human Resources and Farmer Institutions | Kementan, Kemenko, Kemendagri, Pemda/SKPD |
| 9 | Financing aspect | KemenKEU, Kemenko-Eko, Kementan, Swasta |
| 10 | Innovation and technology | Kementan, Pemda/ SKPD, Perguruan Tinggi/ Peneliti |

Source: Ditjen Perkebunan

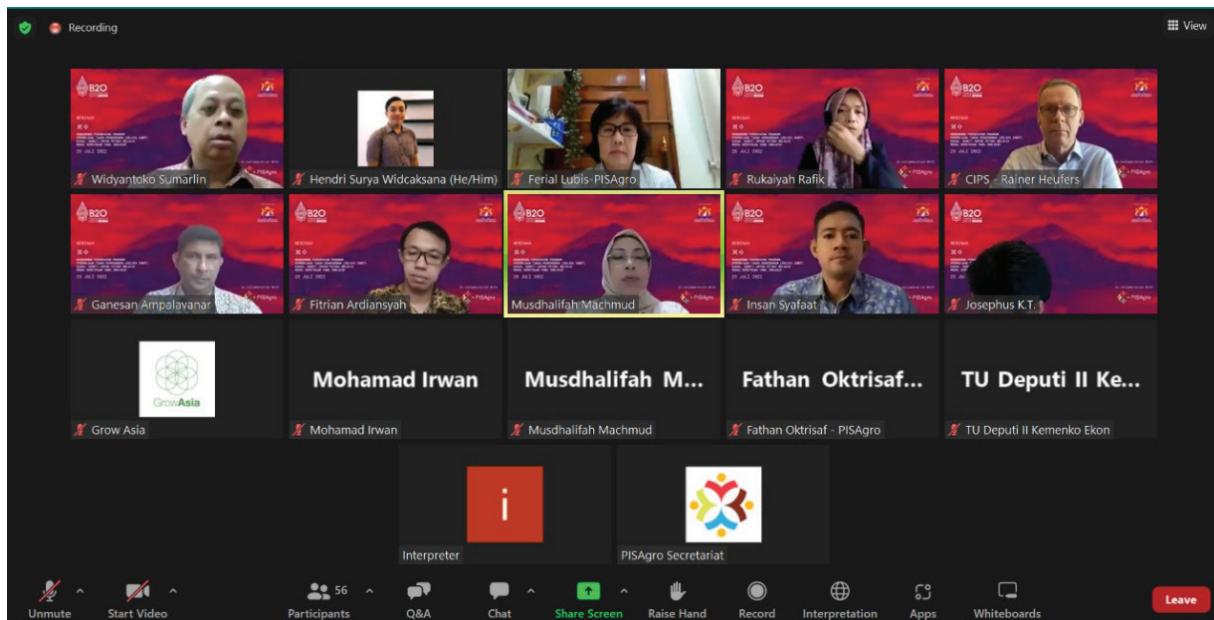
No. 3 and 5 are the direct duties of the Ministry of Agriculture.

Other numbers are cross-sectoral duties

■ SIARAN PERS

SATGAS PERDAGANGAN & INVESTASI B20 DAN PISAGRO BAHAS PEREMAJAAN LAHAN PERKEBUNAN RAKYAT

(Disusun oleh Hendri Surya Widcaksana, PISAgro)



Jakarta, Indonesia – Sekretariat B20 Indonesia bekerja sama dengan *Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture* (PISAgro) menggelar forum diskusi secara hybrid, terkait peremajaan lahan perkebunan, Senin (25/7/2022) kemarin. Diskusi ini memfasilitasi peran pemerintah, pelaku usaha dan akademisi untuk berbagi ide dan praktik terbaik terkait perkebunan yang inklusif.

Mengambil tema “Mendorong Percepatan Program Peremajaan Lahan Perkebunan untuk Petani Model Kemitraan Inklusif,” diskusi ini mengundang perwakilan pemerintah, pelaku usaha dan akademis bidang perkebunan yakni Musdhalifah Machmud, Deputi Koordinator Bidang Koordinasi Pangan & Pertanian, Kemenko Perekonomian; Arif P. Rachmat, *Chair of B20 Trade and Investment Task Force*; Ganeshan Ampalavanar, President Director of Nestle Indonesia and Co-Chair of PISAgro.

Hadir juga Rainer Heufors, Direktur Eksekutif CIPS, dan *Host of T20 Food Security & Sustainable Agriculture Task Force*; Josephus K.T., Komisaris Utama Mandiri Investasi; Widyantoko Sumarlin, *Chief Sustainability Officer* at PT Kirana Megatara dan Insan Syafaat, Direktur Eksekutif PISAgro.

Dalam forum ini, perwakilan petani dan pemerintah daerah juga berbagi informasi mengenai perkebunan rakyat yang diwakili Rukaiyah Rafik, Kepala Sekolah Tani FORTASBI; dan Mohamad Irwan, Bupati Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sementara itu, hadir juga Fitrian Ardiansyah, Global Envoy for Nature-based Solutions & Country Director untuk Indonesia dan Malaysia di IDH.

Diskusi ini memperlihatkan peran penting dan besar sektor perkebunan, utama perkebunan rakyat dalam ekonomi nasional di masa pandemi. Ditjen Perkebunan mencatat pertumbuhan volume ekspor 2020 hingga 2021, naik 3,4 persen dengan peningkatan nilai sebesar 44,8 persen. Ke depannya, potensi pertumbuhan akan permintaan komoditas perkebunan akan terus meningkat.

Berdasarkan data Kementan, komoditas kakao, kopi dan karet, tingkat pengelolaan kebun rakyat mencapai 90 persen, sedangkan sawit mencapai 41 persen. Persoalannya, perkebunan rakyat terkendala produktivitas yang rendah akibat benih bermutu rendah, rendahnya penerapan *Good Agricultural Practices* serta lahan perkebunan yang sudah memasuki usia tua seperti di sawit yang rata-rata usia pohnnya sudah 25 tahun dan tidak lagi produktif.

Pentingnya Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Petani

Arif P. Rachmat, *Chair of B20 Trade and Investment Task Force* mengatakan kemitraan yang solid dan intens antara pemerintah, swasta dan petani bisa memajukan sektor perkebunan yang potensi ekonominya sangat besar dan menyerap lapangan kerja yang besar.

“Kolaborasi mengenai peremajaan ini penting sebagai solusi yang tepat dari masalah produktivitas petani kecil yang menjadi masalah kompleks. Selain itu, peningkatan produktivitas perkebunan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Arif P. Rachmat saat memberikan sambutan pembukaan diskusi.

Hal senada juga dikatakan Musdhalifah Machmud, Deputi Koordinator Bidang Koordinasi Pangan & Pertanian, Kemenko Perekonomian yang mengatakan pemerintah terus menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian melalui upaya peremajaan perkebunan.

“Melalui skema closed-loop inklusif, petani akan terhubung dan terintegrasi dengan pemerintah, lembaga keuangan, industri sebagai *off-taker*, dan industri pendukung lainnya. Hal ini sangat penting, karena petani merupakan tulang punggung, sentral dari sektor ini. Akses pembiayaan dan pelatihan harus dikuatkan bersama-sama,” ujar Ganesan Ampalavanar, Presiden Direktur Nestle Indonesia, dan *Co-Chair PISAgro*.

Dalam kesempatan yang sama, Rainer Heufors, Direktur Eksekutif CIPS dan *Host of T20 Food Security & Sustainable Agriculture Task Force* mengatakan setiap tahunnya terjadi penurunan jumlah petani kecil akibat kurangnya modal dan juga minimnya regenerasi keluarga petani. Hal ini harus jadi perhatian serius pemerintah dan swasta karena berdampak pada keberlanjutan dalam praktik pertanian.

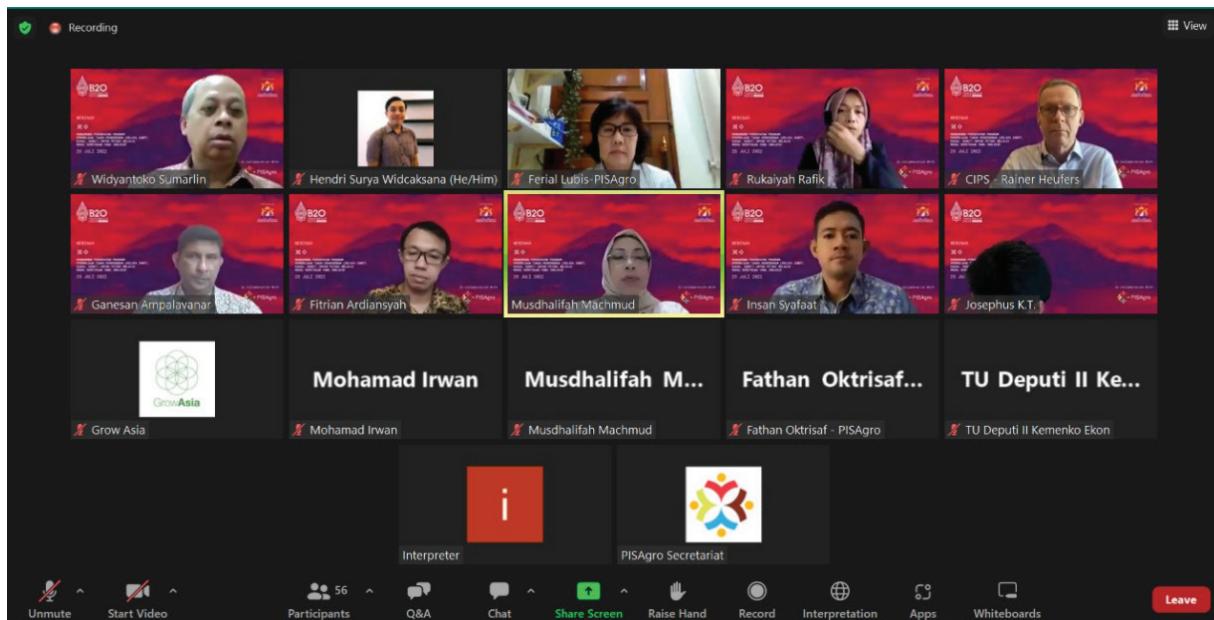
Pada sesi pemaparan dan implementasi, Josephus KT, Komisaris Utama Mandiri Investasi mengatakan implementasi inklusi dan digitalisasi di sektor pertanian meningkat secara signifikan dalam skema kredit petani kecil. Sedangkan Widyatoko Sumarlin, CSO PT Kirana Megatara menjelaskan ide dan peran strategis swasta untuk membantu petani kecil dalam mengelola perkebunan rakyat.

Untuk studi kasus, Bupati Kabupaten Sigi Sulteng, Mohamad Irwan menyampaikan implementasi model loop tertutup inklusif memberikan dampak positif bagi ekosistem petani kecil, utamanya untuk komoditas kelapa, kopi, kakao, dan hortikultura. Rukaiyah Rafik, Kepala Sekolah Tani FORTASBI, menyampaikan wawasannya tentang kebutuhan dasar petani dalam upaya peremajaan kebun.

Pada sesi terakhir, Fitrian Ardiansyah, Global Envoy for Nature-based Solutions & Country Director untuk Indonesia dan Malaysia di IDH dan Insan Syafaat, Direktur Eksekutif PISAgro, menyimpulkan model *closed-loop* dan peremajaan perkebunan yang inklusif penting untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani kecil demi kesejahteraan serta keberlanjutan pangan di sektor pertanian.

B20 TRADE & INVESTMENT TASK FORCE AND PISAGRO DISCUSSED REJUVENATION OF PEOPLE'S PLANTATION CROPS

(Written by Hendri Surya Widcaksana, PISAgro)



Jakarta, Indonesia – The B20 Indonesia Secretariat, in collaboration with the Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro), hosted a hybrid discussion session on rejuvenation of plantation land on Monday (25/7/2022). This session facilitated the role of government, business actors and academics to share ideas and best practices related to inclusive plantations.

Taking the theme “Encouraging the Acceleration of Plantation Land Rejuvenation Programs for Inclusive Partnership Model Farmers,” this discussion invited representatives from the government, business players and academics in the plantation sector, including Musdhalifah Machmud, Deputy Coordinator for Food & Agriculture Coordination, Coordinating Ministry for the Economy; Arif P. Rachmat, Chair of the B20 Trade and Investment Task Force; Ganesan Ampalavanar, President Director of Nestle Indonesia and Co-Chair of PISAgro.

Rainer Heufors, Executive Director of CIPS, and Host of T20 Food Security & Sustainable Agriculture Task Force; Josephus K.T., President Commissioner of Mandiri Investasi; Widyantoko Sumarlin, Chief Sustainability Officer at PT Kirana Megatara and Insan Syafaat, Executive Director of PISAgro, were also in attendance.

In this forum, representatives of farmers and local governments, represented by Rukaiyah Rafik, Principal of FORTASBI Farmers School; and Mohamad Irwan, Regent of Sigi Regency, Central Sulawesi, also shared information regarding smallholder plantations. Meanwhile, Fitrian Ardiansyah, Global Envoy for Nature-based Solutions & Country Director for Indonesia and Malaysia of IDH, was also in attendance.

This discussion demonstrates the critical and widespread importance of the plantation industry,

particularly smallholder plantations, in the national economy throughout the epidemic. The Directorate General of Plantations reported a 3.4 percent increase in export volume from 2020 to 2021, with a 44.8 percent increase in value. The potential for growth in demand for plantation goods will continue to rise in the future.

Based on data from the Ministry of Agriculture, the level of community plantation management in cocoa, coffee, and rubber commodities reached 90 percent, while oil palm reached 41 percent. The issue is that smallholder plantations are hampered by low output due to poor seed quality, a lack of Good Agricultural Practices, and plantation land that has reached old age, such as in oil palm, where the average tree age is 25 years and is no longer productive.

The Importance of Public, Private and Farmer Partnerships

According to Arif P. Rachmat, Chair of the B20 Trade and Investment Task Force, a strong and intense relationship between the government, private sector, and farmers can promote the plantation industry, which has huge economic potential and absorbs a big number of employment.

"This collaboration on rejuvenation is critical as the proper response to the complicated problem of smallholder production." Furthermore, enhancing plantation yield is vital for improving farmer welfare," remarked Arif P. Rachmat in his opening remarks for the discussion.

According to Musdhalifah Machmud, Deputy Coordinator for Food and Agriculture Coordination at the Coordinating Ministry for the Economy, the government's dedication to sustainable growth in agriculture is demonstrated by plantation rejuvenation activities.

"Farmers will be connected and integrated with the government, financial institutions, industry as off-takers, and other supporting industries through an inclusive closed-loop scheme." This is critical since farmers are the backbone and heart of the industry. Access to financing and training must be strengthened together," said Ganesan Ampalavanar, President Director of Nestle Indonesia, and Co-Chair of PISAgro.

On the same occasion, Rainer Heufors, Executive Director of CIPS and Host of the T20 Food Security & Sustainable Agriculture Task Force, stated that the number of small farmers is decreasing year after year due to a lack of financing and a lack of farming family regeneration. Because it has an impact on the sustainability of agricultural methods, this must be a serious issue for both the government and the commercial sector.

Josephus KT, President Commissioner of Mandiri Investasi, stated at the presentation and implementation session that the implementation of inclusion and digitisation in the agriculture sector has expanded significantly in the smallholder loan scheme. Meanwhile, Widyantoko Sumarlin, CSO of PT Kirana Megatara, outlined the concept and strategic role of the private sector in assisting small farmers with smallholder plantation management.

According to Mohamad Irwan, Regent of Sigi Regency, Central Sulawesi, the introduction of the inclusive closed-loop model has a significant influence on the smallholder ecosystem, particularly for coconut, coffee, cocoa, and horticulture commodities. Rukaiyah Rafik, Principal of FORTASBI Farmers School, shared her perspective on farmers' basic requirements as they work to replant their gardens.

In the last session, Fitrian Ardiansyah, Global Envoy for Nature-based Solutions & Country Director for Indonesia and Malaysia at IDH and Insan Syafaat, Executive Director of PISAgro, concluded that the closed-loop model and inclusive plantation rejuvenation are important to increase productivity and income of smallholders for the sake of welfare and food sustainability in the agricultural sector.

Pembangunan Hijau (*Green Finance*) - Transformasi Sistem Pangan Asia

Wawancara PISAgro - Direktur Jenderal Prasarana & Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Pada kesempatan kali ini, PISAgro berbicara dengan Bapak Ir. Ali Jamil, MP., Ph.D mengenai pembangunan hijau untuk transformasi sistem pangan.

1. Kesempatan apa yang bapak lihat di Indonesia / ASEAN untuk membuka pembangunan berkelanjutan untuk petani dengan skala usaha kecil (*smallholders*)?

Pembangunan yang didambakan petani *smallholders* adalah pembangunan yang mempunyai bunga rendah, tanpa agunan dan mudah dicairkan, serta dapat dibayar pada saat panen. Hal ini telah diupayakan pemerintah melalui program KUR, dimana pemerintah mensubsidi bunga menjadi 6%. Selain itu, CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah bentuk program yang baik, yang memberikan kesempatan kepada petani kecil untuk mendapatkan modal dengan bunga setara bunga KUR atau kemitraan dari perusahaan besar.

Salah satu upaya kami agar petani dapat memperoleh modal usaha lebih mudah dan lebih dekat adalah dengan menumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) di desa-desa. LKMA adalah salah satu unit usaha otonom di dalam Gapoktan yang dibentuk untuk memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan bagi anggotanya. LKMA akan melaksanakan fungsi pelayanan kredit/pembangunan dan simpanan lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis sesuai dengan prinsip-prinsip LKM. LKMA berfungsi sebagai sebuah lembaga ekonomi di perdesaan yang melayani simpan pinjam bagi anggota yang usaha taninya dinilai *feasible* namun belum *bankable*. Saat ini tercatat telah ditumbuhkan sekitar 7.703 LKMA di seluruh Indonesia.

2. Menurut Bapak, mengapa taraf hidup petani *smallholders* masih belum meningkat, meskipun dengan peningkatan terkait ESG di ASEAN?

Petani *smallholders* di Indonesia didefinisikan sebagai petani dengan kepemilikan lahan dibawah 0,5 hektar yang memiliki berbagai keterbatasan untuk menjadi menguntungkan dan memberi kesejahteraan bagi petani pelaku usahanya. Secara



skala usaha mereka sudah tidak *economically beneficial*, sehingga untuk mencapai skala usaha minimum mereka bergabung dalam kelompok tani yang akan mengefisienkan biaya produksi mereka. Kementerian Pertanian senantiasa berupaya untuk menjadikan petani-petani Indonesia, termasuk petani *smallholders* maju, mandiri, modern yang berarti mereka harus mampu 1) mengelola dan mengembangkan usaha mereka menjadi lebih unggul dan lebih baik sehingga mampu bersaing dalam pasar nasional maupun internasional; 2) meningkatkan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia dan tidak bergantung kepada impor; dan 3) memanfaatkan teknologi-teknologi terkini dalam rangka mengefisienkan proses produksi pertanian.

Namun tantangan terbesar adalah demografi, petani Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Indonesia dengan karakter yang berbeda-beda dan kemampuan yang beragam. Perlu sumber daya yang luar biasa untuk menjangkau semua petani, upaya pemerintah yang telah dilakukan selama ini ternyata masih kurang masif untuk dapat meningkatkan taraf hidup petani *smallholders*. Yang paling mendasar perlu dilaksanakan adalah mentransformasi petani yang pola pikirnya subsisten menjadi petani dengan pola pikir bisnis, bahwa mereka tidak lagi dapat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah tapi harus mampu mengembangkan memanfaatkan potensi diri dan sekitarnya untuk keberlanjutan usaha mereka.



Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah prinsip dan standar pengelolaan bisnis dan perusahaan yang mengikuti kriteria-kriteria tertentu agar berdampak positif bagi lingkungan (*environment*), sosial-kemasyarakatan (*social*) dan tata kelola usaha (*governance*). Perusahaan yang menerapkan ESG tidak akan mengejar keuntungan perusahaan semata, dengan mengorbankan lingkungan, masyarakat sekitar dan pekerjanya, melainkan mereka akan memperhatikan secara rinci kebermanfaatan perusahaan bagi lingkungan, masyarakat, pekerja dan juga pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan dalam jangka panjang.

Konsep ESG sendiri merupakan konsep yang baru bagi kami, selama ini kami telah mendengar dan memanfaatkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari banyak perusahaan dan BUMN yang bergerak di bidang pertanian atau pendukungnya. Secara prinsip kami sangat mengapresiasi ESG yang dilakukan oleh banyak perusahaan di negara-negara ASEAN dan namun kami belum dapat berkomentar banyak terkait dampaknya terhadap taraf hidup petani smallholders. Salah satu dugaan kami menanggapi informasi yang menyatakan meningkatnya ESG belum dapat meningkatkan taraf hidup petani adalah belum spesifiknya fokus/target perusahaan yang menerapkan ESG terhadap kebutuhan dan kendala produksi petani smallholders, terutama yang berlokasi di wilayah-wilayah yang tidak menjadi target lokasi perusahaan tersebut.

3. Bagaimana Kementerian Pertanian merespon tantangan rendahnya taraf hidup petani, dan bagaimana kita berkolaborasi dengan partner untuk membuat perubahan?

Rendahnya taraf hidup petani menyebabkan petani sulit untuk mendapatkan modal bagi usahatani yang mereka kerjakan. Salah satu program yang kami kira sangat membantu petani dalam hal ini adalah program KUR yang ditujukan untuk sektor pertanian. Tahun 2020 nilai KUR yang diserap oleh sector pertanian adalah sekitar Rp 55,3 T sedangkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 85,6 T. Peningkatan serapan KUR sector pertanian menunjukkan tingkat kepercayaan bank yang semakin meningkat kepada usaha-usaha sektor pertanian baik on-farm maupun off-farm. Kementerian Pertanian bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas petani dan usaha sektor pertanian menjadi lebih feasible dan bankable. Selain KUR, petani juga mendapat bantuan pemerintah melalui program asuransi pertanian dimana petani petani padi dan peternak sapi/kerbau mendapat bantuan biaya premi sebesar 80% dari pemerintah. Program asuransi pertanian akan memberikan penggantian kepada petani pada saat terjadinya bencana baik akibat perubahan iklim maupun serangan hama/penyakit. Hal ini tentu akan lebih memberikan jaminan kepada petani/peternak untuk tetap berusaha di bidang pertanian.

4. Siapa menurut bapak, pihak yang melakukan tindakan/aksi perubahan (perusahaan, pemerintah, dll) untuk membantu peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia dan ASEAN?

Peningkatan kesejahteraan petani merupakan pekerjaan semua pihak, baik pemerintah (pusat dan daerah), *private sector*, perbankan atau sumber permodalan lainnya, kelompok tani, asosiasi perusahaan, komunitas dan seluruh masyarakat atau penduduk yang notabene pengguna jasa/produk petani. Salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah korporasi petani sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Kabinet Kerja pada tanggal 12 September 2017 juga menekankan pentingnya penumbuhan dan pengembangan korporasi petani sebagai landasan peningkatan kesejahteraan petani.

Korporasi petani merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi petani yang memiliki dimensi strategis dalam pengembangan kawasan pertanian karena dibentuk dari, oleh, dan untuk petani. Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani merupakan pemberdayaan petani yang diyakini mampu mewujudkan kelembagaan ekonomi petani yang bersifat korporat (badan usaha) di kawasan

pertanian. Korporasi petani ditumbuhkembangkan untuk menjadikan petani berdaulat dalam mengelola keseluruhan rantai produksi usaha tani. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penumbuhan dan pengembangan korporasi petani sebagai salah satu terobosan dalam mewujudkan kesejahteraan petani yang merupakan tujuan utama pembangunan pertanian (Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani di Kawasan Pertanian, 2020).

Dalam proses penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, kelompok tani mempunyai tugas untuk bertransformasi menjadi sebuah entitas bisnis yang mandiri. Dalam proses transformasi tersebut kelompok tani tidak dibiarkan sendiri tetapi didampingi dan diarahkan oleh berbagai institusi pemerintah, seperti Kemenko perekonomian, kementerian pertanian, kementerian koperasi dan UMKM, dan masih banyak lagi. Selain itu perbankan dan perusahaan BUMN turut membantu korporasi menjadi lebih bankable dan lebih berwawasan bisnis. Di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) banyak OPD yang juga terlibat dalam proses tersebut.



Green Finance – the Transformation of Asia's Food System

A PISAgro Interview - Director General of Agricultural Infrastructure and Facilities, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia

On this occasion, PISAgro had a chance to interview with Mr. Ir. Ali Jamil, MP., Ph.D on green financing for food system transformation.

1. What opportunities do you see in Indonesia / ASEAN to open sustainable financing for small-scale farmers (smallholders)?

The financing that smallholders covet is financing that has low interest, without collateral and is easy to disburse, and can be paid at harvest time. This has been pursued by the government through the KUR program, where the government subsidises interest to 6%. In addition, CSR (Corporate Social Responsibility) is a good form of program, which provides opportunities for small farmers to get capital with interest equivalent to KUR interest or partnerships from large companies.

One of our efforts so that farmers can obtain venture capital more easily and more closely is by growing Agribusiness Microfinance Institutions (LKMA) in villages. LKMA is one of the autonomous business units within Gapoktan which was formed to solve problems/obstacles in access to financial services for its members. The LKMA will carry out the functions of credit/financing services and environmental savings for farmers and agribusiness actors in accordance with the principles of the MFI. LKMA functions as an economic institution in rural areas that serves savings and loans for members whose farming business is considered feasible but not yet bankable. Currently, around 7,703 LKMAs have been grown throughout Indonesia.

2. In your opinion, why is the standard of living of smallholder farmers still not increasing, even with the increase in ESG-related in ASEAN?

Smallholder farmers in Indonesia are defined as farmers with land ownership under 0.5 hectares who have various limitations to be profitable and provide welfare for their business farmers. In terms of business scale, they are no longer economically beneficial, so to achieve a minimum scale of business they join farmer groups which will streamline their production costs. The Ministry of Agriculture always strives to make Indonesian



farmers, including smallholders farmers advanced, independent, modern, which means they must be able to 1) manage and develop their businesses to be superior and better so that they can compete in national and international markets; 2) increase domestic production to meet the needs of the Indonesian population and not depend on imports; and 3) utilising the latest technologies in order to streamline agricultural production processes.

But the biggest challenge is demographics, Indonesian farmers are scattered throughout the Indonesian archipelago with different characters and diverse abilities. Extraordinary resources are needed to reach all farmers, the government's efforts that have been made so far are still not massive enough to improve the living standards of smallholders. The most basic thing that needs to be done is to transform farmers whose mindset is subsistence into farmers with a business mindset, that they can no longer depend on government assistance but must be able to develop and utilise their potential and their surroundings for the sustainability of their business.

Environmental, Social, and Governance (ESG) are principles and standards of business and company management that follow certain criteria in order to have a positive impact on the environment (environment), social and business governance (governance). Companies that implement ESG will

not only pursue company profits, at the expense of the environment, the surrounding community and their workers, but they will pay close attention to the benefits of the company for the environment, society, workers and also the government which will ultimately increase the company's value significantly in the long term.

The ESG concept itself is a new concept for us, so far we have heard and used CSR (Corporate Social Responsibility) from many companies and state-owned enterprises engaged in agriculture or their supporters. In principle, we really appreciate the ESG carried out by many companies in ASEAN countries and however we cannot comment much on its impact on the living standards of smallholders. One of our assumptions in responding to information stating that the increase in ESG has not been able to improve the standard of living of farmers is that the focus/target of companies implementing ESG is not yet specific to the needs and production constraints of smallholders, especially those located in areas that are not the company's target locations.

3. How does the Ministry of Agriculture respond to the challenge of the low standard of living of farmers, and how do we collaborate with partners to make a difference?

The low standard of living of farmers makes it difficult for farmers to get capital for the farming they do. One of the programs that we think is very helpful for farmers in this regard is the KUR program which is aimed at the agricultural sector. In 2020 the KUR value absorbed by the agricultural sector is around Rp. 55.3 T while in 2021 it is Rp. 85.6 T. The increase in KUR absorption in the agricultural sector shows an increasing level of bank confidence in agricultural sector businesses, both on-farm as well as off-farm. The Ministry of Agriculture is working hard to increase the capacity of farmers and agricultural sector businesses to be more feasible and bankable. In addition to KUR, farmers also receive government assistance through an agricultural insurance program in which rice farmers and cattle/buffalo breeders receive an 80% premium fee from the government. The agricultural insurance program will provide compensation to farmers in the event of a disaster either due to climate change or pest/disease attacks. This will certainly give more guarantees to farmers/breeders to keep trying in the agricultural sector.

4. Who do you think is the party that takes action/change actions (companies, government, etc.) to help improve the welfare of farmers in Indonesia and ASEAN?

Increasing the welfare of farmers is the work of all parties, both the government (central and regional), the private sector, banks or other sources of capital, farmer groups, company associations, communities and the entire community or residents who in fact are users of farmers' services/products. One of the government programs aimed at improving the welfare of farmers is the farmer corporation as directed by President Joko Widodo in a Limited Meeting of the Working Cabinet on September 12, 2017 which also emphasised the importance of growing and developing farmer corporations as the basis for improving farmers' welfare.

Farmer's corporation is a form of farmer's economic institution that has a strategic dimension in the development of agricultural areas because it is formed from, by, and for farmers. The growth and development of farmer corporations is the empowerment of farmers who are believed to be able to realise the economic institutions of corporate farmers (business entities) in agricultural areas. Farmer corporations are developed to make farmers sovereign in managing the entire production chain of farming. Therefore, the government continues to encourage the growth and development of farmer corporations as one of the breakthroughs in realising farmer welfare which is the main goal of agricultural development (Guidelines for Growth and Development of Farmer Corporations in Agricultural Areas, 2020).

In the process of growing and developing farmer corporations, farmer groups have the task of transforming into an independent business entity. In the transformation process, farmer groups are not left alone but are assisted and directed by various government institutions, such as the Coordinating Ministry for the Economy, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Cooperatives and MSMEs, and many others. In addition, banks and state-owned companies also help corporations to become more bankable and more business-minded. At the local level (provincial and district) many DPOs are also involved in the process.



 www.pisagro.org

 Pisagro_secretariat

   PISAgro

PISAgro Secretariat
contact@pisagro.org

Insan Syafaat
isyafaat@pisagro.org

Sinarmas Land Plaza Tower 2
22th Floor, JI MH. Thamrin Kav. 51
Jakarta 10350, Indonesia

T. +62 21 5047 8888

F. +62 21 5043 8888